

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA TANGERANG SELATAN

Astika Rahmawati*, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Email of corresponding author: astikarahmawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tangerang Selatan. Teknik *sampling* jenuh yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 SKPD. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Semoga penelitian ini dapat diterapkan di Tangerang Selatan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan aplikasi standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

Kata kunci: penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, system pengendalian intern, kualitas laporan keuangan SKPD.

Abstract

This study is entitled “The Effect of Government Accountant Standard Application, Information Technology Utilization, and Internal Control System on the SKPD Financial Report Quality of Tangerang Selatan City Government. This study aims to examine the effect of government accountant standard application, information technology utilization, and internal control system on the SKPD financial report quality of Tangerang Selatan City Government. The population in this study was Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in Tangerang Selatan. Saturation sampling technique used in this study as many as 37 SKPD. Data collection in this study used questionnaire. The data were processed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that government accountant standard application, information technology utilization, and internal control system partially have a positive effect on the SKPD financial report quality of Tangerang Selatan City Government. Hope this study can be applied in Tangerang Selatan to improve the financial report quality through improved government accountant standard application, information technology utilization, and internal control system.

Keywords: government accountant standard application, information technology utilization, internal control system, SKPD financial report.

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010) adalah kewajiban pemerintah (agen) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Suwardjono (2005), informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai, diantaranya harus memiliki nilai atau kualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, akan nampak dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan).

Tabel 1. Daftar opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 s.d. 2015

Entitas pemerintah daerah	Opini tahun 2011	Opini tahun 2012	Opini tahun 2013	Opini tahun 2014	Opini tahun 2015
Kota Tangerang Selatan	WTP	WTP DPP	WDP	WDP	WTP

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2016

Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kabupaten/kota yang mengalami peningkatan opini dari laporan keuangan pemerintah daerahnya. Hal ini sesuai dengan Tabel 1 yang menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2015 Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan opini. Berdasarkan IHPS II tahun 2016, Kota Tangerang Selatan tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Namun pada tahun 2015, Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (Badan Pemeriksa Keuangan, 2015).

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2013 menurun. Apabila sebelumnya Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2014 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas sejumlah proyek kegiatan yang didanai dari APBD tahun 2013 membuat penilaian atau opini yang diberikan menurun, dari WTP menjadi WDP (www.satelitnews.co.id). Dalam tata kelola keuangan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga ditemukan beberapa kelemahan, di antaranya penatausahaan, inventarisasi, dan penilaian aset tetap belum optimal, demikian juga dengan mekanisme dan penatausahaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial (Bansos). Pengelolaan piutang serta proses pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan secara optimal juga menjadi temuan BPK.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Nordiawan (2006) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yaitu SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Salah satu hal yang juga mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Menurut Jogiyanto (2007), informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi

berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, suatu instansi membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Jogiyanto (2007), dengan adanya pengendalian intern, diharapkan akan semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif produktivitas organisasional. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Penelitian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini erat kaitannya dengan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi. Teori ini tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen laporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi, yaitu relevan, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Kiswara, 2011).

Penelitian terdahulu yang mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD, yaitu penelitian dari Juwita (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian Wati *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Modo *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan penelitian Nova (2015) yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanis (2009) yang meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aceh. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Nurillah dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Modo *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh Pramudiarta (2015) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Penelitian Nurillah dan Muid (2014) mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Depok menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Roshanti *et al.* (2014) juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern juga berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Buleleng. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manaf (2015) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh dan Widyaningtias (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS se-Jabodetabek. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian yang diajukan adalah

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori kegunaan-keputusan informasi (*decision-usefulness theory*)

Teori yang mendasari penelitian ini yaitu teori kegunaan-keputusan informasi (*decision-usefulness theory*). Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Komponen-komponen tersebut mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi, yaitu relevan, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Kiswara, 2011).

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar ini syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Nordiawan (2006), terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yakni SAP yang diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, standar akuntansi keuangan ini merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian lain yang mendukung penerapan standar akuntansi yaitu penelitian Suhardjo (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tual. Penelitian Juwita (2013) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian Wati *et al.* (2014) menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Buleleng. Penelitian Mahaputra (2014) juga menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Jogiyanto (1995) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik, maka pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanis (2009) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh. Penelitian lain yang mendukung

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah Penelitian Nurillah dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kota Depok. Penelitian Mahaputra (2014) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Penelitian yang dilakukan Haza (2015) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kota Padang. Penelitian Roshanti *et al.* (2014) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap informasi pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Buleleng. Menurut beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai jika pelaksanaan penyusunannya sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Arens (2008), pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanis (2009) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh. Penelitian Sukmaningrum (2012) menyimpulkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Semarang. Penelitian lain yang mendukung yaitu Penelitian Roshanti *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap informasi pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Buleleng. Penelitian Nurillah dan Muid (2014) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kota Depok. Penelitian Mahaputra (2014) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2012) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini mengambil responden yaitu pegawai bagian akuntansi pada SKPD Kota Tangerang Selatan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Untuk itu, sampel

penelitian ini mengambil keseluruhan populasi sebanyak 37 kantor dengan responden yakni kepala bagian akuntansi di masing-masing SKPD.

DEFINISI OPERASIONAL DAN ALAT ANALISIS

Kualitas laporan keuangan (Y)

Laporan keuangan pemerintah merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Ayuningtyas (2016) yang terdiri dari sepuluh pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

Penerapan standar akuntansi pemerintah (X1)

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi ini yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Ayuningtyas (2016) yang terdiri dari sembilan belas pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

Pemanfaatan teknologi informasi (X2)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengukuran dalam pemanfaatan teknologi informasi ini berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Indriasari dan Nahartyo (2008) yang terdiri dari sepuluh pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

Sistem pengendalian intern (X3)

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Ayuningtyas (2016) yang terdiri dari enam belas pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

Skala pengukuran

Untuk mengukur instrumen dalam variabel penelitian ini, digunakan skala likert dengan rentang 1 sampai dengan 5. Kriteria yang digunakan antara lain: jawaban sangat setuju mendapat skor 5; jawaban setuju mendapat skor 4; jawaban ragu-ragu/netral mendapat skor 3; jawaban tidak setuju mendapat skor 2; dan jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 1-3, digunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = kualitas laporan keuangan

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien regresi untuk penerapan standar akuntansi pemerintah

β_2 = koefisien regresi untuk pemanfaatan teknologi informasi

β_3 = koefisien regresi untuk sistem pengendalian intern

X_1 = penerapan standar akuntansi pemerintah

X_2 = pemanfaatan teknologi informasi

X_3 = sistem pengendalian inten

e = koefisien *error* (nilai pengganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum responden

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi di masing-masing SKPD Kota Tangerang Selatan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan sampel jenuh. Sampe jenuh menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Untuk itu sampel penelitian ini mengambil keseluruhan populasi sebanyak 37 SKPD Kota Tangerang Selatan. Kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 37 responden dengan respon rate sebesar 100%.

Uji kualitas data

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan instrumen kuesioner. Item pertanyaan untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} korelasi *product moment* $> r_{tabel}$ (0,374) dengan tingkat kepercayaan 95%, maka semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan rumus *Cronbach's alpha*. Dari hasil perhitungan dalam penelitian ini, setiap variabel memberikan nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$, maka dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2006).

Uji normalitas

Berdasarkan hasil analisis dengan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0 for Windows dengan kriteria pengujian nilai *asymptotic significant (two tailed)* $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka nilai residual memenuhi asumsi klasik atau berdistribusi normal. Diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,887 atau lebih besar dari α -nya (0,05), sehingga distribusi data pada variabel penelitian adalah normal dan bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

Uji multikolinearitas

Berdasarkan hasil output SPSS 21.0 for Windows pada lampiran 7, diketahui bahwa nilai *tolerance value* $\geq 0,1$ dan nilai VIF < 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 21.0 for Windows, diperoleh nilai signifikansi untuk semua variabel pada masing-masing persamaan $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda, maka dapat diperoleh hasil yang menunjukkan *adjusted R square* (*adj R²*) sebesar 0,649. Artinya penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi

informasi, dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan sebesar 64,9%, dan sisanya 35,1% (diperoleh dari 100%-64,9%) ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dan tidak dijelaskan. Adapun persamaan yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 1,391 + 0,100 X_1 + 0,271 X_2 + 0,309 X_3 + e$$

Koefisien variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) yaitu 0,100 yang menyatakan apabila terjadi peningkatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar satu satuan sedangkan variabel yang lain tetap atau konstan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan kurang lebih 0,100. Koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) yaitu 0,271 yang menyatakan apabila terjadi peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu satuan sedangkan variabel yang lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan kurang lebih 0,271. Koefisien variabel sistem pengendalian intern (X_3) yaitu 0,309 yang menyatakan apabila terjadi peningkatan dalam sistem pengendalian intern sebesar satu satuan sedangkan variabel yang lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan kurang lebih 0,309.

Berdasarkan perhitungan regresi, dapat diketahui F_{hitung} (23,206) keseluruhan variabel lebih besar dari nilai F_{tabel} (2,89) dan nilai F Sig. lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Dengan hasil seperti ini, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh simultan terhadap variabel kualitas laporan keuangan, dan dapat pula dinyatakan bahwa model regresi yang terbentuk dinyatakan cocok atau *fit*. Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 95% ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($n - k$) di mana $n = 37$ dan $k = 4$, diperoleh nilai t_{hitung} 2,423 > t_{tabel} 2,035 atau nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau Sig. < α , hipotesis pertama dipenuhi dalam penelitian ini. Dengan demikian, variabel penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini dikarenakan SKPD Kota Tangerang Selatan telah menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan baik dalam penyajian laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik dilakukan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan dengan mencatat penilaian awal aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahaputra (2014), Wati *et al.* (2014), Juwita (2013), Suhardjo (2013), dan Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 95% ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($n - k$) di mana $n = 37$ dan $k = 4$, diperoleh nilai t_{hitung} 2,993 > t_{tabel} 2,035 atau nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau Sig. < α , hipotesis kedua dipenuhi dalam penelitian ini. Dengan demikian, variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini dikarenakan SKPD Kota Tangerang Selatan telah memanfaatkan teknologi informasi dengan cukup baik dalam penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang cukup baik dilakukan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan dengan memasang jaringan internet yang dapat dimanfaatkan unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Haza (2015), Roshanti *et al.* (2014), Mahaputra (2014), Nurillah dan Muid (2014), dan Darwanis (2009) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 95% ($\alpha = 0,05$), dan *degree of freedom* ($n - k$) di mana $n = 37$ dan $k = 4$, diperoleh nilai t_{hitung} 4,139 > t_{tabel} 2,035 atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau Sig. < α , hipotesis ketiga dipenuhi dalam penelitian ini. Dengan demikian, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan sehingga hipotesis ketiga (H_3)

diterima. Hal ini dikarenakan SKPD Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan sistem pengendalian intern dengan baik dalam penyajian laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dilakukan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan dengan karyawan yang telah memanfaatkan fasilitas komunikasi dalam bekerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahaputra (2014), Nurillah dan Muid (2014), Roshanti *et al.* (2014), Sukmaningrum (2012), dan Darwanis (2009) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (3) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk variabel penerapan standar akuntansi, SKPD Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah secara baik, sehingga dapat memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memiliki pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan, di antaranya bagian keuangan harus melakukan penghapusan aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Variabel sistem pengendalian intern SKPD Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara cukup baik karena dalam menyajikan laporan keuangan terdapat hambatan yaitu peralatan pendukung yang masih sering mengalami kendala seperti sistem keamanan pada komputer yang diperbarui secara tidak teratur yang akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan, maka SKPD Kota Tangerang Selatan harus membuat jadwal secara teratur untuk melakukan pengamanan pada komputer yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Sedangkan, variabel sistem pengendalian intern diharapkan dapat melaksanakan sistem pengendalian intern secara baik, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawai agar dapat mengetahui bagaimana kinerja dari para pegawai tersebut, sehingga SKPD dapat memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja para pegawainya untuk mencapai tujuan instansi.

Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti dalam lingkup yang lebih luas dan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh sebesar 64,9%. Hal ini mengartikan bahwa masih ada variabel lain sebesar 35,1% di luar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan pertanyaan terbuka dalam media pengumpulan data menggunakan kuisioner dan melakukan *pilot test* terhadap 30 orang yang bukan responden dalam penelitian ini, yaitu pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1*. www.bpk.go.id (diakses pada tanggal 10 Januari 2017).
- Darwanis. (2009). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 2(2).
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan Program SPSS* (edisi keempat). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Trikonimika*, 12(2).
- Mahaputra, I.P.U.R. dan Putra, I.W. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id> (diakses pada 2 Mei 2017).
- Modo, S.M. *et al.* (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Nova, W.S. (2015). Pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nugraheni, P. dan Subaweh, I. (2008). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(1).
- Nurillah, A.S. dan Muid, D. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada SKPD Kota Depok). *Dipenogoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Pemerintahan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pramudiarta, R. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah: Studi persepsi pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Roshanti *et al.* 2014. Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1). <http://ejournal.undiksha.ac.id> (diakses tanggal 2 Mei 2017).
- Satelitnews. (2014). *Tangsel dihadihi WDP, Kota Tangerang bertahan* (diakses pada 5 Februari 2017).
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipenogoro.
- Wati, K.D. *et al.* (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1). <http://ejournal.undiksha.ac.id> (diakses tanggal 25 Januari 2017).